

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIANDAN PERIKANAN KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026**



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026 yang merumuskan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pelaksanaannya dirancang selama 3 (tiga) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan khususnya di Kota Bekasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang mantap dan berkelanjutan.

Bekasi, Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



HERBERT S.W PANIAITAN, S.STP., M.SI

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19741017 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan.....	8
2.2 Dasar Hukum pembentukan Perangkat daerah.....	8
2.3 Struktur Organisasi.....	8
2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.4.1 Sumber Daya Manusia.....	28
2.4.2 Asset, Sarana dan Prasarana.....	35
2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.5.1 Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan.....	36
2.5.2 Pelayanan Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	38
2.5.3 Pelayanan Pertanian.....	39
2.5.4 Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	42
2.5.5 Pelayanan Perikanan.....	42
2.5.6 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi selama Tahun 2019-2023.....	44
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	53
2.6.1 Tantangan.....	53
2.6.2 Peluang.....	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.....	56
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	65
4.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi.....	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS.....	70
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	70
5.2 Kebijakan.....	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Dkppp Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	92
BAB VIII PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan dan Ketersediaan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.....	29
Tabel 2.2	Pegawai PNS Menurut Golongan/Ruang.....	34
Tabel 2.3	Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal.....	34
Tabel 2.4	Pegawai Menurut Eselonering.....	34
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan perikanan Kota Bekasi tahun 2022.....	35
Tabel 2.6	Ketersediaan/kebutuhan Pangan per hari Kota Bekasi tahun 2022.....	37
Tabel 2.7	Sumber Pemenuhan Kebutuhan Beras Kota Bekasi tahun 2022.....	37
Tabel 2.8	Perkembangan Harga Beras.....	38
Tabel 2.9	Produksi Pertanian Kota Bekasi.....	40
Tabel 2.10	Produksi Peternakan Kota Bekasi.....	42
Tabel 2.11	Produksi Peternakan Kota Bekasi.....	42
Tabel 2.12	Produksi Perikanan Kota Bekasi.....	43
Tabel 2.13	Produksi Perikanan Kota Bekasi.....	44
Tabel 2.14	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023.....	45
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023.....	47
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKPPP Kota Bekasi tahun 2019-2023 (Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023).....	50
Tabel 2.17	Capaian Kinerja DKPPP Kota Bekasi tahun 2022.....	52
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	61
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Katahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi.....	68
Tabel 4.2	Formulasi Perhitungan IKU DKPPP Kota Bekasi.....	69
Tabel 5.1	Penilaian Analisa SWOT DKPPP Kota Bekasi.....	72
Tabel 5.2	Formulasi Strategi SWOT.....	74
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	78
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Program, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Tahun 2024-2026.....	84
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan perikanan (DKPPP) yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran.....	94
Tabel 7.2	Data Indikator Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan...	10
Gambar 4.1	Cascading DKPPP Tahun 2024.....	67
Gambar 6.1	Pohon Kinerja DKPPP Kota Bekasi.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

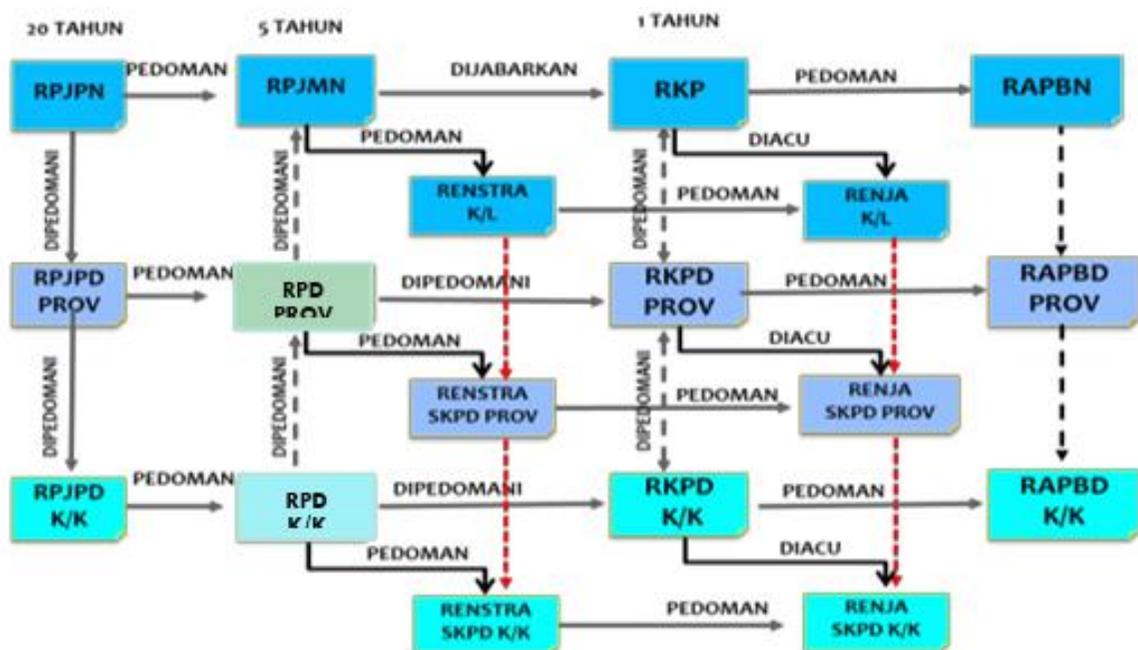
Dengan demikian program-program pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang mantap dan berkelanjutan. Menyadari sepenuhnya akan kenyataan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Bekasi bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan yang kuat didukung dengan produktivitas pembangunan pertanian dengan optimalisasi hasil tanaman pangan dan perkebunan, peningkatan produksi peternakan dan perikanan, didukung dengan pengawasan pangan sehingga dihasilkan pangan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH) yang berkualitas.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di

dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026. Rencana Strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bekasi. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) untuk memajukan Kota Bekasi.

Dengan memposisikan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selevel dengan RPJMD, maka secara garis besar hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD untuk pengembangan Kota Bekasi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan *STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM* dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disesuaikan dengan tahapan dan tata cara Sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 86/2017).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 - (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- (15) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan Kota Bekasi;
- (16) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
- (17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2024-2026, sebagai penjabaran kebijakan dan program-program pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Selain hal tersebut penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dimaksud pula untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam bentuk rumusan perencanaan pembangunan dan sebagai pendukung RPD Kota Bekasi dan RPJM Nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026 adalah untuk menentukan program dan kegiatan, tahapan-tahapan target pencapaian dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, menetapkan strategi pembangunan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien diperlukan analisa internal dan eksternal sehingga ditetapkan strategi pembangunan yang “jitu”. Dengan demikian maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai penjabaran dari RPD Kota Bekasi akan menjadi landasan untuk setiap penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2024 - 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, arah kebijakan dan strategi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

Memuat tentang Inovasi program dan kegiatan dinas, analisa Strengths, weaknesses, opportunities dan threats (SWOT).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Memuat tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pada tahun 2022 terdapat perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melebur menjadi satu Organisasi yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

2.2 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 27 tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

2.3 Struktur Organisasi

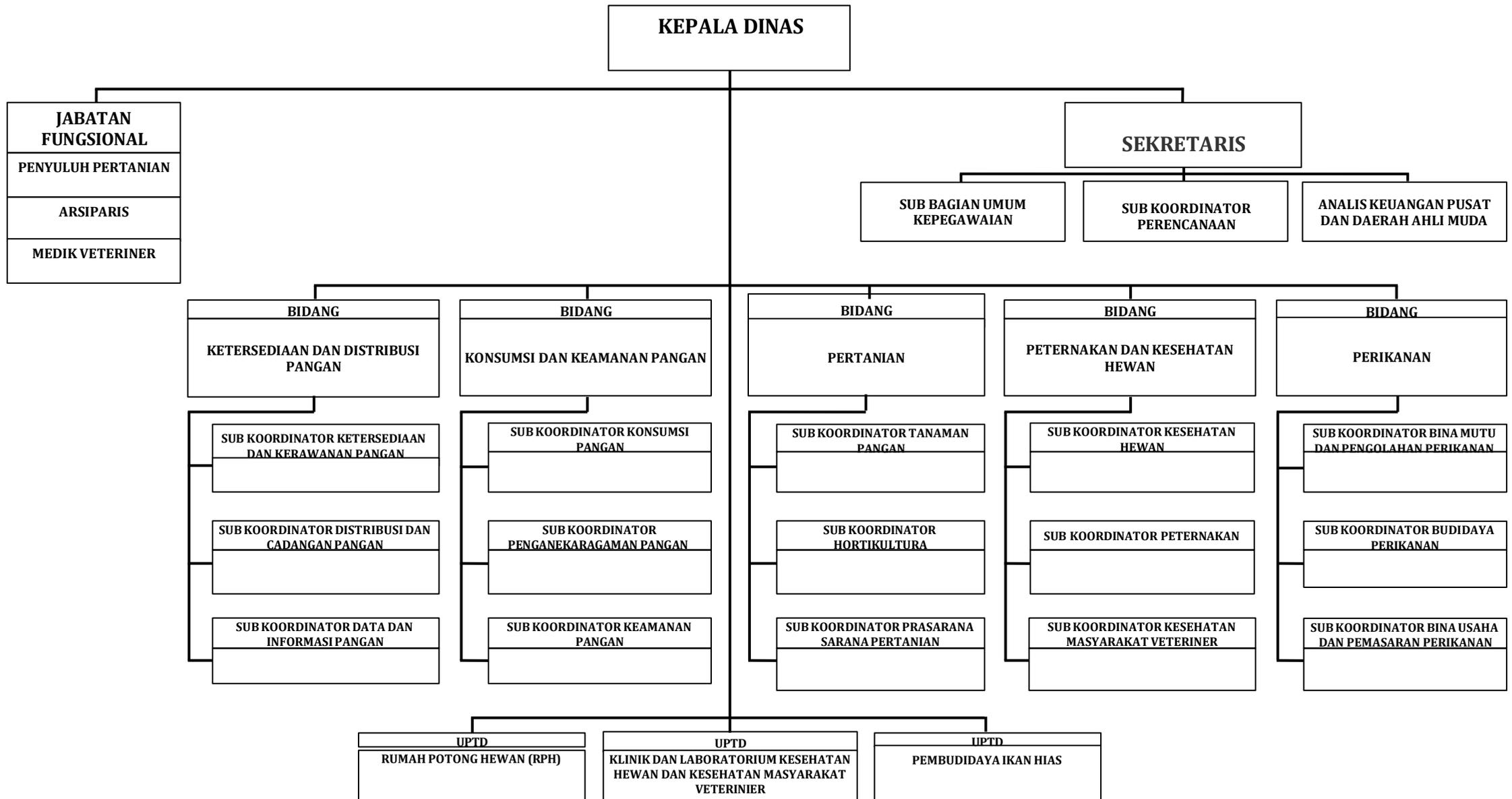
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Koordinator Perencanaan (Perencana Ahli Muda);
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Keuangan (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah).
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 1. Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
 2. Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);

3. Sub Koordinator Data dan Informasi (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda).
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
1. Sub Koordinator Konsumsi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
 2. Sub Koordinator Penganeekaragaman Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
 3. Sub Koordinator Keamanan Pangan (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda).
- e. Bidang Pertanian, membawahi :
1. Sub Koordinator Hortikultura (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda);
 2. Sub Koordinator Tanaman Pangan (Penyuluh Pertanian Ahli Muda);
 3. Sub Koordinator Prasarana Sarana Pertanian (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda).
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda);
 2. Sub Koordinator Peternakan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda);
 3. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner (Medik Veteriner Ahli Muda).
- g. Bidang Perikanan, membawahi :
1. Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan (Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda);
 2. Sub Koordinator Budidaya Perikanan (Analisis Aquakultur Ahli Muda);
 3. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran Perikanan (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda).
- h. UPT Dinas :
1. Kepala UPTD Pembudidaya Ikan Hias;
 2. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
 3. Kepala UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tergambar dalam bagan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN



a) Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

I. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
 - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan baranginventaris Dinas;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

1. Perencana Ahli Muda

- (1) Perencana Ahli Muda mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.
- (2) Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
 - d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
 - e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
 - f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

- (1) Analis Keuangan Pusat Dan Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.
- (2) Analis Keuangan Pusat Dan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;
 - d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;

- e. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
- f. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

III. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta data dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyaifungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, penyusunan, penyediaan data, intervensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan ketersediaan dan kesrawan pangan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, analisis, perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan dan kerjasama dalam pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, analisis, pengkajian, penyusunan, pemantauan dan analisis dalam pelaksanaan data dan informasi;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas; dan
 - i. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda)

Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, analisis, penyusunan, penyediaan data, intervensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda)

(1) Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.

(2) Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, analisis, penyusunan, penyediaan data, intervensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Data dan Informasi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda)
 - (1) Sub Koordinator Data dan Informasi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
 - (2) Sub Koordinator Data dan Informasi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, analisis, penyusunan, penyediaan data, intervensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

IV. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- 1) Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi konsumsi pangan, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- 2) Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 3. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyiapan, pengendalian, penyusunan, pemanfaatan, pendampingan, pengkajian, dan analisis dalam pelaksanaan konsumsi pangan;
 4. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan,

penyusunan, pengkajian, pendampingan, analisis, dan pemantauan dalam pelaksanaan penganekaragaman pangan;

5. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, penilaian, pemantauan dan analisis serta pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Penganekaragaman Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Penganekaragaman Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan konsumsi pangan;
- (2) Sub Koordinator Penganekaragaman Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyiapan, pengendalian, penyusunan, pemanfaatan, pendampingan, pengkajian dan analisis dalam pelaksanaan konsumsipangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Sub Koordinator Konsumsi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Konsumsi Pangan (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan,

memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penganekaragaman pangan;

- (2) Sub Koordinator Konsumsi Pangan (Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, penyusunan, pengkajian, pendampingan, analisis dan pemantauan dalam pelaksanaan penganekaragaman pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Keamanan Pangan (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda)

- (1) Sub Koordinator Keamanan Pangan (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penganekaragaman pangan;
- (2) Sub Koordinator Keamanan Pangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, penyusunan, pengkajian, pendampingan, analisis dan pemantauan dalam pelaksanaan penganekaragaman pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

V. Bidang Pertanian

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan

sarana pertanian, tanaman pangan serta hortikultura untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

(2) Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
3. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan, penyediaan, pengawasan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pertanian;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengembangan, pengendalian, pemantauan, penanggulangan, analisa, promosi dan pengelolaan serta rekomendasi teknis dalam pelaksanaan tanaman pangan;
6. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, peningkatan, penyiapan, pengembangan, pengendalian, promosi, penanggulangan dan pengamatan serta pengelolaan dalam pelaksanaan hortikultura;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Hortikultura (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda)

- (1) Sub Koordinator Hortikultura (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan prasarana dan sarana pertanian;
- (2) Sub Koordinator Hortikultura (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan, penyediaan, pengawasan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pertanian;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Sub Koordinator Tanaman Pangan (Penyuluh Pertanian Ahli Muda)

- 1) Sub Koordinator Tanaman Pangan (Penyuluh Pertanian Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan tanaman pangan;
- 2) Sub Koordinator Tanaman Pangan (Penyuluh Pertanian Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengembangan, pengendalian, pemantauan, penanggulangan, analisa, promosi dan pengelolaan serta rekomendasi teknis dalam pelaksanaan tanaman pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Prasarana Sarana Pertanian (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda)

- a. Sub Koordinator Prasarana Sarana Pertanian (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan hortikultura;
- b. Sub Koordinator Prasarana Sarana Pertanian (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, peningkatan, penyiapan, pengembangan, pengendalian, promosi, penanggulangan dan pengamatan serta pengelolaan dalam pelaksanaan hortikultura;
4. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

VI. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Bidang Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan peternakan;
 4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan hewan;
 5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, fasilitasi, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Kesehatan Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan peternakan;
- (2) Sub Koordinator Kesehatan Hewan (Medik Veteriner Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan peternakan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Sub Koordinator Peternakan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Peternakan (Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kesehatan hewan;
- (2) Sub Koordinator Peternakan Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan hewan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner (Medik Veteriner Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner (Medik Veteriner Ahli Muda) mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kesehatan hewan;
- (2) Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner (Medik Veteriner Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan hewan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

VII. Bidang Perikanan

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi budidaya perikanan, bina mutu dan pengolahan perikanan serta bina usaha dan pemasaran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan budidaya perikanan;
 4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,

- pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan bina mutu dan pengolahan perikanan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, perumusan, penyusunan, pengembangan, pemasaran, promosi, pengawasan dan pembinaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan bina usaha dan pemasaran;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 9. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan (Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan (Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan budidaya perikanan;
- (2) Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan (Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan budidaya perikanan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Sub Koordinator Budidaya Perikanan (Analis Aquakultur Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Budidaya Perikanan (Analis Aquakultur Ahli Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan,

memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan bina mutu dan pengolahan perikanan;

- (2) Sub Koordinator |Budidaya Perikanan (Analisis Aquakultur Ahli Muda) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan bina mutu dan pengolahan perikanan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran Perikanan (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda)

- (1) Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran Perikanan (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda) mempunyai tugas Membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan bina usaha dan pemasaran;
- (2) Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran Perikanan (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, perumusan, penyusunan, pengembangan, pemasaran, promosi, pengawasan dan pembinaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan bina usaha dan pemasaran;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki 64 (enam puluh empat) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala

DKPPP Nomor: 067/Kep.2317.a/DKPPP.Set/XII/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Beberapa SOP diantaranya sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB)
2. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
3. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur
4. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai
5. SOP Permohonan Cuti Pegawai
6. SOP Usulan Kenaikan Pangkat
7. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS
8. Surat Masuk
9. SOP Pemeliharaan/Maintenance Barang Inventaris Kantor
10. SOP Usulan Pembuatan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)
11. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
12. SOP Usulan Pembuatan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu)
13. SOP Surat Keluar
14. SOP Pemeliharaan/ Mutasi Barang Persediaan yang bersumber dari pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan.
15. SOP Pengeluaran/Mutasi Barang Non Persediaan yang bersumber dari pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
16. SOP Penerimaan Barang Persediaan dari Hibah/ Sumbangan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
17. SOP Penerimaan Barang Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
18. SOP Penerimaan Barang Non Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
19. SOP Penerimaan Barang Non Persediaan Hibah/Sumbangan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
20. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja
21. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
22. SOP Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan
23. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
24. SOP Penyusunan Rencana Kerja
25. SOP Penyusunan Laporan Operasional (LO)
26. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

27. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
28. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Perselisihan (UP)
29. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN)
30. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa
31. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan
32. SOP Penyusunan Neraca
33. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (LTU)
34. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN)
35. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (LGU)
36. SOP Pendistribusian Bantuan Pangan Untuk Keluarga Kurang Mampu, Balita Gizi Kurang dan Bencana Alam
37. SOP Peningkatan Cadangan Pangan
38. SOP Analisa Harga dan Pasokan Pangan
39. SOP Pendataan Ketersediaan Pangan Strategis
40. SOP Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
41. SOP Penyusunan Neraca Bahan Makanan Strategis (NBM)
42. SOP Fasilitasi Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
43. SOP Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi
44. SOP Penerbitan Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan
45. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Impor Produk Hortikultura
46. SOP Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Tani Hortikultura
47. SOP Penetapan Pola Pangan Harapan
48. SOP Penetapan Calon Manfaat Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
49. SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pasar Tradisional/Modern
50. SOP Penerbitan Sertifikat Pembinaan Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
51. SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
52. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
53. SOP Penerbitan Rekomendasi Importasi Produk Perikanan
54. SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Perikanan
55. SOP Pengawasan Penggunaan Obat-Obatan Perikanan
56. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Ruminansia dan Babi
57. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan

58. SOP Penerbitan Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara
59. SOP Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak
60. SOP Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak
61. SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
62. SOP Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan
63. SOP Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
64. SOP Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan

2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 99(sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian 66 (enam puluh enam) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK dan 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai TKK dan dapat dilihat dari Tabel Analisis Jabatan berikut ini :

Tabel 2.1
KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN APARATUR DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ABK BERDASARKAN KEMENPAN	JUMLAH ABK EXISTING	KELAS JABATAN	KETERSEDIAAN					K E T
					PNS		TKK		JUM LAH	
									(f+g)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>		<i>g</i>		<i>h</i>	<i>i</i>
1	Kepala Dinas	1	1	14	HERBET S.W PANJAITAN, SSTP.,M.Si	1		-	1	-
2	Sekretaris	1	1	12	ARIF SUPRIYANTO, SE.,M.Si	1		-	1	-
3	Sub Koordinator Perencanaan	1	1	9	RR Sri Setianingrum	1		-	1	-
	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2	2	7	Nur Ainun	1	Jemri Purba,SE	3	4	-
	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	6			Dina Maryati, S.Pt			-
	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	6			Ari Prasetyo, S.Pt			-
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	9	Mujiani, S.Ap	1		-	1	-
	Pengadministrasi Umum	3	3	5	Nurul Fatiha	7	Fajar Nahrowi	7	14	
				5	Tri Suciati		Supianah			
				5	Sri Wahyuni Hidayati		Ready Kurniawan			

	Analisis SDM Aparatur	1	0	7			Guntur Adi Maifa	1	1	
	Pengelola Kepegawaian	3	1	6	Ihrom	1	Tita puspitawati	1	2	
							Mila Purbowati	1	1	
							Tri Lestari	1	1	
	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	2	1	6	Agung Indra Saputra.A.Md	1	Enri Nazarudin Hafidi, S.Ip.,SH	1	2	
	Arsiparis Ahli Pertama	2	2	8	Hj. Kartini, S.Ap	1		0	1	
					Endah Mundihartini, S.Ap			0	1	
5	Sub Koordinator Keuangan	1	1	9	Ratna Juita, S.Sos.,MM	1		-	1	
	Bendahara	1	1	7	Neng Ela Hana Pertiwi, S.Sos	1		-	1	
	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	7	Sulaeman	1		-	1	
	Verifikator Keuangan	1	1	6		0	Michael Yanuar Gulo	1	1	
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	5		0	Kesit Prasetyo	1	1	
6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1	1	11	Namar Naris, S.Sos., M.Si	1		-	1	
7	Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1	7	Andi Johari, S.Ap	1		-	1	
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama				Yuki Vegarini, SP	3		0	3	
	Analisis Pangan				Bakti Gunawan					
	Pengelola Ketahanan Pangan				Muzakir Walad					
8	Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	1	7	Rini Lestari, SE.,MH	1		-	1	
	Analisis Pangan					0	Deti Yulianti	4	4	
	Penyuluh Pangan						Arab Atmaja Putra			
							Tommy Riyanto Permana			
							Sindy Rosiana			
9	Sub Koordinator Data Dan Informasi Pangan	1	1	7	Dewi Koryati, S.Ap	1		-	1	
					Abdul Haris					
10	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1	11	Mimik Suhendri, SE.,M.Si	1		-	1	

11	Sub Koordinator Konsumsi Pangan	1	1	7	Sutarja, S.Sos	1		-	1	
					Suhaeli, SE	1	Setiawati	1	2	
12	Sub Koordinator Penganekaragaman Pangan	1	1	7	Eril Supriadi,SKM.,M.Si	1		-	1	
	Pengelola Penganekaragaman Pangan					0	Diah Febriani Rosawati	2	2	
	Analisis Pangan						Rizki Amalia			
13	Sub Koordinator Keamanan Pangan	1	1	7	Suwardi, SH.,M.Si	1		-	1	
	Analisis Pangan				Rusma Purba, SE	1	Masridol EM	1	2	
14	Kepala Bidang Pertanian	1	1	11	Dra. Annie Marijam, M.Si	1		-	1	
15	Sub Koordinator Hortikultura	1	1	7	Suwardi, SH.,M.Si	1		-	1	
	Pengelola Instalasi kebun/lahan praktek Screen House					2		0	2	
	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura				Taufik Hidayatulloh					
					Jumenah					
16	Sub Koordinator Tanaman Pangan	1	1	7	Ir. Tri Imaningtyas Hendras Utami, MM	1		-	1	
	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian				Lili Juliarsih, SKM	1	Ina Russiana	1	2	
17	Sub Koordinator Prasarana Sarana pertanian	1	1	7	Ir. Eko Revmawati	1		-	1	
	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, sarana dan Prasarana Pertanian				Rani Sujati	7	Nur Marchiana, S.Ap	2	9	
	Pengelola Program Penyuluhan				Herisman		Nur Hadi Hedyan			
	Analisis Program Penyuluhan				Solihin, S.Sos					
					Samsul Bahri					
	Penyuluh Pertanian Terampil				Ika Septarina, A.Md					
	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama				Susi Silpana Sumendap, SP					
					Dwi Ernarningsih					

18	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	11	Ester, SE.,MT	1		-	1	
19	Sub Koordinator Kesehatan Hewan	1	1	7	Nurhasan SKM	1		-	1	
	Medik Veteriner Ahli Muda				Drh. Sabiqah Imani	2		0	2	
					Drh. Asri Nuraini					
20	Sub Koordinator Peternakan	1	1	7	Adventus Pardosi, SE	1		-	1	
	Analisis Pakan Ternak				Aulia Rizqika, S.Pt	1		0	1	
21	Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	7	Drh. Sariyanti, M.Si	1		-	1	
	Paramedik Veteriner Pelaksana/ Terampil				Seni Riantini, A.Md	4		0	4	
	Medik Veteriner Ahli Pertama				Drh. Laili Choiriah	1				
	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
	Pengelola Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner				Rachmad	1				
22	Kepala Bidang Perikanan	1	1	11	Neneh, Sip	1		-	1	
23	Sub Koordinator Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan	1	1	7	Dewi Frida Sabena Sihombing, SH.,M.Si	1		-	1	
	Analisis Mutu Hasil Perikanan					0	Alex Mario	2	2	
	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu terhadap laboratoris terhadap produk hasil perikanan						Sonya Meidyawati F	1	1	
24	Sub Koordinator Budidaya Perikanan	1	1	7	Ir. Bina Pinem	1		-	1	
						0	Arry Devi Handayani	2		
							Dwi Ayu Susilawati			
25	Sub Koordinator Bina Usaha dan pemasaran Perikanan	1	1	7	Rika Riana, S.Sos	1		-	1	
					Budiyatno	1	Karlina Agustini	1	2	
							Fitri Apriani, A.Md	1		

26	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	1	1	11	M. Subarkah	1		-	1	
					Abdul Haris	1		0	1	
27	Kepala UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	7	Drh. Dahlia Dhestinia	1		-	1	
	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				Richman Ckristian Desmouth Sianturi, SH	1		0	1	
28	Kepala UPTD Pembudidaya Ikan Hias	1	1	11	Drs. Asep Haryanto			-	1	
	Penyusun Rencana Jaringan Pasar Ikan Hias	1	1	7	Sahrudin	1	Pipin Pirmansyah, SE	1	2	

Tabel 2.2
Pegawai PNS Menurut Golongan/ Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0 Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
3.	Pembina (IV/a)	14 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12 Orang
5.	Penata (III/c)	5 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	4 Orang
8.	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	6 Orang
10.	Pengatur (II/c)	5 Orang
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4 Orang
12.	Juru Tingkat I (I/d)	1 Orang

Tabel 2.3
Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S – 2 (Pasca Sarjana)	16 Orang
2.	S – 1 (Sarjana)	26 Orang
3.	D – 3 (Diploma Tiga)	3 Orang
4.	SLTA	18 Orang
5.	SLTP	1 Orang

Tabel 2.4
Pegawai menurut Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II A	0 Orang
2.	Eselon II B	1 Orang
3.	Eselon III A	1 Orang
4.	Eselon III B	4 Orang
5.	Eselon IV A	15 Orang
6.	Eselon IV B	-
7.	Non Eselon/ Arsiparis	8 Orang

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Analisis Beban Kerja (ABK) di atas, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi masih

membutuhkan 98 (sembilan puluh delapan) orang Pegawai. Untuk saat ini sudah diisi oleh Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

2.4.2 Asset, Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI			KET
		BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Mobil Dinas	18	-	-	18
2	Motor Dinas	18	2	-	20
3	Lemari Besi	30	-	-	30
4	Lemari Kaca	15	-	-	15
5	Lemari Kayu	3	-	-	3
6	Fillig Besi/ Metal	47	-	-	47
7	Meja KerjaPejabat Eselon III	6	-	-	6
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	19	-	-	19
9	Meja Rapat	2	-	-	2
10	Meja Kerja	67	-	-	67
11	Meja Biro	1	-	-	1
12	Kursi KerjaPejabat Eselon III	6	-	-	6
13	Kursi Kerja Pejabat EselonIV	19	-	-	19
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	67	-	-	67
15	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	10	-	-	10
16	Kursi Rapat	60	-	-	60
17	Sofa	19	-	-	19
18	Komputer	31	-	-	31
19	Laptop	1	-	-	1
20	Printer	20	1	-	21
21	Monitor	31	-	-	31

NO	URAIAN	KONDISI			KET
		BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
22	Scanner	1	-	-	1
23	Mouse/ VDA	31	-	-	31
24	Alat Penghancur Kertas	-	4	-	4
25	Mesin Absensi	2	-	-	2
26	Proyektor + Attachment	1	-	-	1
27	Wireless Amplifier	2	-	-	2
28	Dispenser	8	-	-	8
29	Lemari Es	2	-	-	2
30	Televisi	2	-	-	2

2.5 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.5.1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Pada indikator kinerja presentase penguatan cadangan pangan pencapaian masih dibawah target yang ditetapkan. Cadangan pangan disini yang diukur hanya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari stok cadangan pangan di gudang. Realisasi pada tahun terakhir (tahun 2022) lebih rendah dibandingkan target yang ditentukan serta jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan stok cadangan pangan yang tersedia di Kota Bekasi belum memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan Perda Nomor 12 Tahun 2018 yaitu minimal 100 ton karena keterbatasan kemampuan anggaran, sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bekasi lebih memprioritaskan pada sektor-sektor pembangunan yang segera dan mendesak untuk segera dilaksanakan pada tahun 2022, pada tahun ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi membeli stok beras sebanyak 38.5 ton. Stok cadangan pangan Pemerintah Kota Bekasi digunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan rawan pangan serta masalah lainnya. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu menambah stok cadangan pangan pemerintah Kota Bekasi.

Kota Bekasi bukan daerah pertanian dan perkebunan oleh karenanya ketersediaan bahan pangan di Kota Bekasi sangat tergantung pada asupan dan distribusi dari daerah lain, terutama daerah sekitar. Hasil pertanian dan perkebunan Kota Bekasi berkontribusi tidak lebih dari 5% dari total kebutuhan sehingga 95% kebutuhan beras, sayur dan buah-buahan tergantung dari daerah lain.

Tabel 2.6
Ketersediaan/Kebutuhan Pangan rata-rata per Hari
Kota Bekasi Tahun 2022

No	Bahan Pangan Pokok	Ketersediaan (Kg/hari)	Kebutuhan (Kg/hari)	Harga
1	Beras	11.296.692	737.647	
	Premium			Rp. 12.250
	Medium			Rp. 9.000
2	Jagung	85.212	28.404	Rp. 17.500
3	Bawang merah	827.784	275.928	Rp. 30.000
4	Bawang putih	613.530	204.510	Rp. 20.000
5	Cabe besar	628.128	209.376	Rp. 30.000
6	Cabe rawit	423.630	141.210	Rp. 45.000
7	Daging sapi/kerbau	1.643.370	328.674	Rp. 145.000
8	Daging ayam Ras	3.018.960	503.160	Rp. 38.000
9	Telur ayam Ras	1.927.410	385.482	Rp. 30.000
10	Gula pasir	633.006	211.002	Rp. 15.000
11	Minyak goreng	36.522	12.174	Rp. 14.000

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal yang perlu terus dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan stabilisasi harga dan pasokan pangan. Karena Kota Bekasi lebih merupakan pemanfaat produk pertanian, perkebunan dan perikanan maka indikator berjalan baiknya distribusi pangan ditunjukkan dengan ketersediaan pangan dan fluktuasi harga pangan yang bisa ditunjukkan dengan tingkat inflasi. Beras memiliki kontribusi yang besar pada tingkat inflasi pada sektor pangan, kontribusi beras terhadap inflasi pada sektor pangan sekitar 75% oleh karenanya stabilitas harga beras harus dijaga.

Tabel 2.7
Sumber pemenuhan kebutuhan beras Kota Bekasi Tahun 2022

No	Sumber ketersediaan	Jumlah (ton)	Prosentase
1	Cadangan pangan Pemerintah Kota	38,5	0,02%

2	Cadangan pangan provinsi	100	0,04%
3	Pasar	260.471	98%
4	Subsidi pangan Pemerintah Kota, Pemprov dan Pemerintah Pusat	209	0,08%
5	Hasil pertanian	4.734	1,78%
	Jumlah	265.553	100%

Tabel. 2.8
Perkembangan Harga Beras

No	Komoditas	Harga Rata2/kg 2021	Harga Rata2 /kg 2022	Naik/ Turun	% naik/ Turun
1	Beras Premium	Rp.12.000	Rp. 12.500	Rp. 500	0,04%
2	Beras Medium	Rp.10.500	Rp. 11.000	Rp. 500	0.05%
3	Beras Termurah	Rp. 7.802	Rp. 7.931	Rp.129	2%

2.5.2 Pelayanan Konsumsi dan Keamanan Pangan

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan (*desirable dietary pattern*) adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu.

Pada tahun 2022 *global food security indeks* (GFSI) Indonesia diantara 113 negara menduduki peringkat ke-62 dibawah negara singapura pada tingkat pertama, Malaysia 28, Thailand 52 dan Vietnam pada urutan 54. untuk mengukur GFSI ada 3 (tiga) indikator yang diperhatikan keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan. Dari ketiga komponen tersebut negara mendapatkan nilai rendah untuk kualitas dan

keamanan pangan. Ini berarti bahwa kita telah sanggup memenuhi kuantitas pangan yang dibutuhkan tetapi belum mampu menjamin kualitas dan keamanan yang dikonsumsi masyarakat. Kita hanya mampu memperoleh poin 47,1 dari nilai maksimal 100.

Indikator kinerja persentase penanganan daerah rawan pangan, realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih dibawah target yang ditentukan daerah dan nasional. Penyebab utama terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan di Kota Bekasi adalah ketersediaan pangan, akses terhadap listrik, akses terhadap air bersih, akses terhadap fasilitas kesehatan dan berat badan balita. Beberapa kelurahan di wilayah Kota Bekasi memiliki tingkat konsumsi normatif per kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi bersih, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan produksi pangan.

Penanganan daerah rawan pangan di Kota Bekasi belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi kerentanan terhadap rawan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, promosi konsumsi makanan lokal yang ada juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kapasitas produksi terutama melalui peningkatan produktivitas. Masalah ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietaryscore*) dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

2.5.3 Pelayanan Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bekasi memang tidak berkembang karena wilayah ini termasuk kategori urban, dimana pada umumnya pertanian

bukanlah menjadi sektor yang diandalkan. Usaha pertanian di kota ini yang masih dikembangkan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayur- sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, durian, duku, jambu biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat- obatan (jahe, kencur). Saat ini luas lahan pertanian yang ditanami padi hanya tinggal 434 Ha saja, dan produksi padi yang dihasilkan hanya sekitar 4.734 ton per tahun tentunya sangat jauh dengan kebutuhan beras masyarakat Kota Bekasi. Rata-rata kebutuhan konsumsi beras warga Kota Bekasi sekitar 300 gram per hari. Kebutuhan per tahun rata-rata per orang sekitar 108 kg per tahun. Berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 2,458.823 orang, berarti kebutuhan beras adalah lebih kurang 737.647 kg per hari atau 265.553 ton per tahun. Hasil pertanian Kota Bekasi hanya bisa memenuhi 4.734 ton atau 2% dari kebutuhan total beras penduduk Kota Bekasi. Tingkat produktifitas terus ditingkatkan dengan penggunaan teknologi dengan menggunakan peralatan modern, penyediaan pupuk,

Kebutuhan sayuran masyarakat Kota Bekasi rata-rata 219.000 ton pertahun sedangkan produksi hasil pertanian Kota Bekasi hanya sekitar 14.340 ton pertahun, pada tahun 2022 produksi buah-buahan setahun hanya 5.441 ton per tahun sedangkan kebutuhan per tahun sekitar 131.400 ton. Dari data di atas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Bekasi berupa beras, sayuran dan buah-buahan masih tergantung dari produksi pertanian daerah sekitar Kota Bekasi.

Tabel 2.9
Produksi pertanian Kota Bekasi

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		2020	2021	2022
	Tanaman Pangan			
1.	Padi	4.733	3.137	3.995,1
2.	Jagung	66	83,3	204,7
3.	Kedelai	0	0	-
4.	Ubi Kayu	239,5	309,3	369,3
5.	Ubi Jalar	28,8	0	-
6.	Kacang Tanah	0	0	-
	Jumlah	5.067	3.530	4.569
	Sayuran			
1.	Petsai Sawi	1.907	1.783	2.083

2.	Kacang Panjang	190,7	138,0	575
3.	Bayam	4.035	4.935	5.160
4.	Ketimun	54,6	0	-
5.	Cabe	75	270	645
6.	Terong	42	220,5	535,5
7.	Kangkung	4.165	5.124	5.341
	Jumlah	10.469	12.471	14.340
	Buah			
1.	Jeruk	-	0,9	6
2.	Durian	28	230	5
3.	Duku	6,7	10	6
4.	Jambu Biji	325,5	683	577
5.	Mangga	1.441	1.621	236
6.	Sawo	206,5	626,0	147
7.	Pepaya	10.443	1.480	1.710
8.	Pisang	254,2	584	810
9.	Rambutan	1.000	799	1.944
	Jumlah	13.706	6.034	5.441
	Biofarmaka			
1.	Jahe	100,6	2.460	2.309
2.	Laos/Lengkoas	0	2.519	5.492
3.	Kencur	49,5	596,0	697
4.	Kunyit	0	1.174	967
5.	Lempuyang	0	240	474
6.	Temu Ireng	0	0	-
7.	Lidah Buaya	0	0	-
	Jumlah	150	6.989	9.939
	Jumlah Total	29.392	29.023	34.289

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di atas. Produksi pertanian di kota ini terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan/biofarmaka), peternakan, dan perikanan. bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok tanaman pangan, dimana pada tahun 2021 produksinya mencapai 29.023 ton, sedikit meningkat dibandingkan produksi tahun 2020 yang sekitar 29.392 ton.

Produksi perkebunan rakyat berupa tanaman obat-obatan naik dari 150 ton pada tahun 2020 menjadi 6.989 ton pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 9.939 ton. Sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2020 produksinya mencapai 10.469 ton, pada tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 12.471 ton. Tahun 2022 produksi sayuran naik cukup signifikan menjadi 14.340 ton

2.5.4 Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2022 produksi pangan asal hewan yang dihasilkan dari peternakan di Kota Bekasi rata-rata turun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021, daging sapi, daging kerbau, daging domba, daging kambing, daging babi, dan daging semuanya turun. Hanya produksi telur yang naik sedikit jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Produksi Peternakan Kota Bekasi

No	Jenis Komoditas	Produktivitas (ton)	
		2021	2022
1.	Daging Sapi	3.249.839	3.306.535
2.	Daging Kerbau	8.585	12.264
3.	Daging Domba	2.912.556	2.964.718
4.	Daging Kambing	3.324.682	3.370.087
5.	Daging Babi	5.719	4.892
6.	Daging Unggas	489.539	137.857
	Jumlah	9.990.920	9.796.353
7.	Telur	1.468.544	1.516.353
	Jumlah	1.468.544	1.516.353
8.	Susu	121,00	123,13
	Jumlah	121,00	123,13
	Jumlah Total	11.459.585	11.312.829

Tabel 2.11
Produksi Peternakan Kota Bekasi

No.	Komoditas	Konsumsi Per Kapita	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Surplus/ Defisit
1.	Daging Sapi	2,5	6.000	1.988,93	4.011,07
2.	Daging Ayam	11,5	27.600	1.880,09	25.719,92
3.	Telur	6,53	15.672	1.084,38	14.587,62
4.	Susu	16,43	39.432	123,13	39.308,88
	Jumlah		88.704	5.076,51	83.627,49

2.5.5 Pelayanan Perikanan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyatakan bahwa pangan asal hewan yang aman, bermutu dan

bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh atau memperbaiki sel tubuh yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pertumbuhan. Protein hewani memiliki lebih banyak kandungan dan keseimbangan asam amino dibandingkan dengan protein nabati. Esensinya fungsi protein hewani menyebabkan penyediaannya menjadi sebuah keharusan.

Sebagaimana sektor-sektor ekonomi pertanian lainnya, aktivitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan di Kota Bekasi menghadapi kendala keterbatasan lahan yang bisa diolah menjadi area perikanan, disamping kita tidak memiliki potensi perikanan laut. Perkembangan perikanan di Kota Bekasi lebih mengandalkan pada perikanan air tawar, yang berkembang hanyalah berupa perikanan darat dan budidaya ikan hias air tawar. Perikanan darat dikembangkan di areal kolam/tambak dan perairan umum, dan ikan yang dibudidayakan terbatas pada jenis ikan-ikan tertentu saja seperti ikan nila, mas, gurame, lele, patin, dan jenis ikan lainnya.

Sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini terjadi penurunan produksi ikan konsumsi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan produksi ikan konsumsi pada tahun 2021 dan 2020. Pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 produksi pada kisaran 2.113, 55 ton turun menjadi sekitar 1.856,36 ton pada tahun 2021 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 1.742,45 ton. Dari hasil Analisa sementara ada beberapa sebab penurunan produksi ikan konsumsi di Kota Bekasi, diantaranya adalah Berkurangnya lahan perikanan disebabkan perubahan fungsi sebagai tempat tinggal atau kebutuhan lainnya dan margin keuntungan dari hasil perikanan kurang menjanjikan disebabkan tingginya biaya operasional pemeliharaan ikan

Tabel 2.12
Produksi Perikanan Kota Bekasi

No	Komoditas	Produksi		
		2020	2021	2022
1.	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	1.742	1.782,6	1.887
2.	Produksi Ikan Hias (ekor)	20.623.141	22.560.000	23.463.400
3.	Olahan Hasil Perikanan (ton)	87.135	88.135,58	98.043,50

Tabel 2.13
Produksi Perikanan Kota Bekasi

No	Komoditas	Angka Konsumsi (kg/per cap/tahun)	Kebutuhan (ton/tahun)	Produksi (ton/tahun)	Surplus/ Defisit
1.	Ikan Konsumsi	50,49	121.176	1.742,45	119.433,55
Jumlah			121.176	1.742,45	119.433,55

Sebagai indikator kedua dari program peningkatan produksi ikan hias pada tahun 2021 sebesar 22.560.000 ekor dari target pada tahun 2021 sebesar 21.649.777 ekor, tercapai 104,20% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 produksi ikan hias sebanyak 23.463.400 ekor dari target sebanyak 22.757.661 ekor atau 103,10% capaian target pada tahun 2022. Sepuluh jenis ikan yang banyak dibudidayakan diantaranya: blackghost, manfish, tetra congo, tera, falmas, Discus, Guppy dan Cupang yang merupakan kegiatan budidaya perikanan yang banyak digeluti masyarakat Kota Bekasi.

Capaian target ikan konsumsi pada tahun 2022 hanya mencapai 103,10% dari target capaian pada Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan. Hal ini disebabkan terjadinya kemarau Panjang yang menyebabkan pasokan air sangat terbatas sehingga menghambat budidaya ikan konsumsi akibatnya produksi ikan konsumsi menurun. Namun faktor ini bukan merupakan satu-satunya penyebab penurunan produksi. Belum semua petani menggunakan bibit ikan yang berkualitas juga mempengaruhi produksi ikan, selain itu kurangnya penggunaan teknologi juga menjadi sebab penurunan produksi.

2.5.6 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian Perikanan Tahun 2019-2023

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja DKPPP Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dari DKPPP melalui tingkat

pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023 terdapat 4 (empat) sasaran strategis harus dicapai oleh DKPPP Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.14
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra DKPPP
Kota Bekasi Tahun 2019–2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khusus Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP	Nilai	A (80)	A (80)	A (81)	A (81)	A (82)
Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Kuat	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	38%	39%	40%	41%	41,5%
Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Persen	38%	39%	40%	41%	42%
Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Jumlah Total Produksi Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	Persen	38%	39%	40%	41%	41,5%

Sumber Renstra DKPPP Tahun 2019-2023

Gambaran capaian kinerja DKPPP Kota Bekasi dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019–2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019–2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DKPPP	Target Renstra DKPPP Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai Akuntabilitas (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	A (80)	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	B (62)	B (65,70)	BB (73,34)	BB (74,68)	BB (78,14)	77,50%	82,10%	90,50%	92,20%	94,14%
2	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	38%	39%	40%	41%	41,5%	38%	39%	40%	41%	42,3%	100%	100%	100%	100%	101,92
3	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	38%	39%	40%	41%	42%	38%	39%	40%	41%	46,94%	100%	100%	100%	100%	111,76%
4	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	38%	39%	40%	41%	41,5%	38%	39%	40%	41%	44,29%	100%	100%	100%	100%	106,72%

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa DKPPP dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP mencapai BB (nilai=74,68) di tahun 2022 periode ke-4 Renstra 2019-2023.

Capaian indikator ini tahun 2022 adalah sebesar 92,20% yang didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Capaian indikator ini tahun 2022 adalah sebesar 100%, Capaian indikator ini didukung oleh tiga program yaitu: (a) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, (b) Program penanganan kerawanan pangan, dan (c) Program pengawasan keamanan pangan.

3. Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian.

Capaian indikator ini tahun 2022 adalah sebesar 100% Capaian indikator ini didukung oleh satu program yaitu Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

4. Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan.

Capaian indikator ini tahun 2022 adalah sebesar 100%, Capaian indikator ini didukung oleh tiga program yaitu: (a) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (b) Program pengelolaan perikanan budidaya, dan (c) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur DKPPP yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tepat waktu dan tepat sasaran karena didukung data dan informasi yang valid penerima bantuan cadangan pangan (data FSVA dan Dinsos) (3) Melakukan pengawasan dengan pengambilan sampel pangan melalui pengujian

20 pasar tradisional dan pasar modern se Kota Bekasi.

(4) Melaksanakan pembinaan higiene sanitasi dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha pangan dan non pangan asal hewan; (5) Melaksanakan pengawasan, pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan pada unit usaha produsen, retail pangan asal hewan baik retail modern maupun pasar tradisional;

Serta (6) dukungan regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam mencapai target sasaran tersebut, DKPPP Kota Bekasi melaksanakan 8 (delapan) program mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 (Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019–2023), diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019-2023
(Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2019–2023)**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	2.627.230.000	3.498.886.456	16.826.408.025	17.093.150.302	0	2.175.631.762	3.121.702.536	15.192.209.985	13.826.992.264	0%	91,81%	89,22%	90,29%	80,89	35%	40%
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	80.000.000	1.980.000.000	307.600.000	521.240.000	0	77.500.000	1.690555.300	224.777.000	445.963.000	0%	96,88%	85,40%	73,07%	85,56	20%	22%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	100.000.000	0	1.400.000.000	1.240.000.000	0	0	0	1.125.839.6000	1.052.705.600	0%	0%	0%	80,42%	84,90	25%	25%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	898.000.000	0	250.000.000	379.045.000	0	831.827.000	0	207.934.998	349.972.000	0%	92,63%	0%	83,17%	92,33	-25%	-25%
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	800.000.000	8.100.000.000	2.708.685.000	2.572.912.447	0	702.552.352	7.200.086.202	2.611.994.582	1.008.525.500	0%	87,82%	88,90%	96,43%	39,20	35%	37%
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	274.000.000	442.827.500	499.250.000	863.539.500	0	195.701.000	353.385.200	385.192.755	823.427.500	0%	71,42%	80%	77,15%	95,35	20%	22%
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	0	0	425.012.000	540.177.000	0	0	0	329.841.900	432.823.400	0%	0%	0%	77,61%	80,13	-25%	-25%
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	0	0	0	278.149.000	0	0	0	0	261.731.000	0%	0%	0%	0%	94,10	0%	0%

Sumber: Data Diolah Subbagian Perencanaan DKPPP Kota Bekasi, 2023.

Pada tahun 2019 DKPPP masih terdiri dari dua dinas yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian pada tahun 2020 digabungkan menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP), sehingga Berdasarkan tabel realisasi anggaran DKPPP dari tahun 2019- 2023 di atas, realisasi anggaran setiap tahunnya rata-rata sekitar 90 persen, serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 35 persen dan rata- rata pertumbuhan realisasi anggarannya sebesar 40 persen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa DKPPP dapat merealisasikan program/kegiatannya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Rasio ketercapaian selama 5 (lima) tahun pelaksanaan antara realisasi dan anggaran program Renstra D K P P P tahun 2019-2023 ketercapaian tertinggi secara keseluruhan mencapai 91,81% pada tahun 2020 dan terendah tahun 2021 tercapai 89,22%, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2020 rasio realisasi tertinggi sebesar 91,81% sedangkan rasio ketercapaian terendah tahun 2021 sebesar 89,22%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dari 25% dan realisasi 40%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat rasio ketercapaian tertinggi pada terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 96,88% dan terendah tahun 2022 dengan realisasi 73,07% sedangkan realisasi rata- rata pertumbuhan anggaran dari 20% terealisasi 22%.
3. Pada tahun 2019-2020 ada refocusing anggaran pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sehingga ketercapaian realisasi anggaran menjadi 0%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terealisasi 25% dari 35% yang ditargetkan.
4. Ketercapaian rasio anggaran dengan realisasi Program Pengawasan Keamanan Pangan masih sangat rendah karena keterbatasan anggaran dan adanya refocusing anggaran, sehingga rata-rata pertumbuhan anggaran -25% dan realisasi -25%.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2022 dengan realisasi 96,43% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 87,82%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 35% dari 37%

dikarenakan penambahan jumlah kegiatan dan anggaran.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2021 dengan realisasi 80% dan terendah pada 2022 yaitu 77,15%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 20% dari 22%.
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2022, dan pada tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena keterbatasan anggaran dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -25% dari -25%.
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tidak ada kegiatan dan anggaran.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan DKPPP tahun 2019 digunakan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diperoleh dari analisis kinerja DKPPP.

Pada tahun 2022, DKPPP Kota Bekasi memiliki empat (4) sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan; (2) Meningkatnya ketahanan pangan yang kuat; (3) Meningkatnya produksi hasil pertanian; dan (4) Meningkatnya produksi hasil perikanan dan peternakan, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU. Berikut capaian kinerja keempat sasaran serta IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD khususnya DKPPP	Nilai Akuntabilitas DKPPP	82	74,68	91%
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Kuat	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	41%	41%	100%
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	41%	41%	100%

4	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan	41%	41%	100%
---	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----	-----	------

Sumber: Data Diolah Subag Perencanaan

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek, dengan luas wilayah ± 210 KM² saat ini didiami oleh kurang lebih 2.468.448 jiwa. Pemerintah Kota Bekasi harus menjamin ketersediaan pangan utama dan pangan penunjang untuk memenuhi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) merupakan daerah konsumen produk peternakan. Pada Tahun 2022, kebutuhan pangan asal hewan / produk peternakan masyarakat Kota Bekasi mencapai 88.704 ton terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur dan susu. Kebutuhan pangan asal hewan yang tinggi ini tidak diikuti dengan produksi pangan asal hewan yang cukup. Pada Tahun 2022, produksi peternakan Kota Bekasi hanya mencapai 10.551 ton atau hanya 11,89 % dari kebutuhan. Sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan asal hewan banyak didatangkan dari daerah-daerah lain di luar Kota Bekasi.

Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewan sektor peternakan di Kota Bekasi disebabkan keterbatasan sumber daya lahan, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dan alih fungsi lahan yang terjadi secara masif. Selain itu, faktor usaha budidaya yang masih dilakukan secara konvensional dan hanya merupakan usaha sampingan/bukan usaha pokok menyebabkan usaha budidayapeternakan kurang berkembang.

2.6.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bekasi adalah :

- a) Alih fungsi lahan pertanian, peternakan dan perikanan;
- b) Minimnya pemahaman pemanfaatan lahan yang terbatas untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
- c) Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras dan gandum/terigu dan belum secara maksimal memanfaatkan sumber kalori/karbohidrat lainnya;
- d) Tingkat konsumsi beras masyarakat harus mulai dikurangi karena

dibutuhkan pola konsumsi yang ideal, nilai skor pola pangan harapan masih rendah;

- e) Masih terdapatnya KK miskin yang harus mendapat penanganan dan mendapatkan subsidi pangan;
- f) Terkait dengan mutu dan keamanan pangan, masih ada kecenderungan masyarakat menggunakan unsur tambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP);
- g) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan untuk kecerdasan, dan minimnya suplay ikan konsumsi yang diproduksi di Kota Bekasi;
- h) Ancaman penyebaran penyakit hewan menular dan zoonosis;
- i) Kurangnya Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan pembinaan masyarakat terhadap pertanian, peternakan dan perikanan;
- j) Penggunaan teknologi dan peralatan modern kurang dimanfaatkan guna meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
- k) Perlu membangun pertanian perkotaan dengan system Urban Farming.

2.6.2 Peluang

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bekasi adalah :

- a. Besarnya jumlah penduduk Kota Bekasi merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi ada pada peringkat kedua di Jawa Barat, keadaan ini dapat mempercepat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta meningkatkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- d. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi, demikian pula untuk hortikultura;
- e. Letak geografis Kota Bekasi dekat dengan Ibu Kota Negara yang memiliki akses besar untuk bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga yang membidangi pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat

sehingga peluang untuk bertambahnya belanja Pemerintah untuk sektor pertanian, peternakandan perikanan akan semakin besar;

- g. Memiliki cukup banyak Kelembagaan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang dibentuk oleh masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam upaya meningkatkan produksi, memperluas pasar, meningkatkan nilai jual (*value added*) produksi, pengolahan, pemasaran dan mensosialisasikan pola konsumsi pangan beragam, bergiziseimbang, dan aman (B2SA);
- h. Menjadikan Kota Bekasi sebagai peluang usaha yang menjanjikan di lahan yang sempit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Penanganan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kedepan semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Usaha pertanian di kota ini yang masih dikembangkan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayur- sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, duren, duku, jambu biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat- obatan (jahe, kencur). Usaha peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, ayam buras, itik. Sedangkan perikanan darat mencakup beberapa jenis ikan untuk konsumsi yang dibudidayakan di kolam/tambak serta usaha budidaya ikan hias. Dengan kondisi seperti di atas, maka tidaklah mengherankan apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bekasi sangatlah kecil.

Memperhatikan kondisi terkini pembangunan ketahanan pangan secara umum dan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan seperti dipaparkan dalam Bab sebelumnya maka permasalahan yang diramalkan akan muncul pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang di antara lain:

a) Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Setiap warga masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh pangan sesuai dengan yang dia butuhkan. Oleh karena itu maka Pemerintah harus menyediakan layanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat. Kelompok pangan padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat

terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah utama yang masih kita hadapi.

Situasi ketersediaan pangan suatu wilayah tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik.

Ketersediaan pangan di Kota Bekasi merupakan jumlah dari cadangan pangan Pemkot Bekasi, produksi hasil pertanian, ketersediaan pangan di pasar, subsidi pangan. Dengan keadaan komposisi ketersediaan pangan seperti ini, Kota Bekasi mengandalkan pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga kelancaran arus distribusi pangan menjadi andalan utama. Cadangan pangan dan subsidi pangan juga masih sangat terbatas.

Diprediksi keadaan-keadaan berikut akan mempengaruhi kinerja program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dengan titik berat pada peningkatan cadangan pangan, diantara isu-isu tersebut diantaranya:

1. Kenaikan harga pangan khususnya beras;
2. Berkembangnya cadangan pangan hidup masyarakat (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
3. Muncul dan berkembangnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,

b) Pertanian

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan. Kelambatan pemenuhan pangan

akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya mengendalikan harga dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan supply.

Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada musim panen supply meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antar daerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena: (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Namun demikian upaya meningkatkan hasil produksi pertanian meliputi peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura belum mencapai hasil optimal hasil pertanian terus mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya Kota Bekasi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan, juga dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pertanian perkotaan adalah salah satu pendekatan untuk mempertahankan produksi pertanian dengan memanfaatkan teknik menanam dan teknologi pertanian lainnya. umumnya permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan hasil pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha pertanian
- 2) Belum dikembangkannya secara optimal tanaman pangan alternative (non padi)
- 3) Kurangnya sarana pertanian untuk pengembangan budidaya

sayuran hidroponik

- 4) Kurangnya penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian

c) Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pemenuhan kualitas gizi masyarakat

- 1) Ancaman penyakit hewan
- 2) Jaminan keamanan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal

d) Perikanan

Pemenuhan kebutuhan protein merupakan sesuatu yang penting. protein bisa dihasilkan oleh tumbuhan berupa buah dan sayuran tetapi protein kualitas pertama (first class protein) dihasilkan oleh daging hasil peternakan ruminansia dan juga dari ikan. Ikan merupakan alternatif pangan selain daging yang dapat diandalkan untuk pemenuhan kecukupan protein masyarakat. selain harganya lebih murah dari pada daging sapi atau hewan ternak ruminansia lainnya, ikan lebih mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Namun upaya peningkatan produksi perikanan ikan masih terkendala oleh masalah-masalah berikut:

- 1) Kurangnya prasarana dan sarana untuk budidaya ikan konsumsi
- 2) belum adanya koperasi atau badan usaha yang membantu membeli hasil perikanan dengan harga yang lebih tinggi
- 3) Belum semua pembudidaya ikan menggunakan benih ikan yang memenuhi standar
- 4) Harga pakan fluktuatif sehingga memberatkan pembudidaya ikan

e) Konsumsi dan Keamanan Pangan

Meskipun Kota Bekasi bukan merupakan daerah penghasil pangan yang besar tetapi ketersediaan pangan pada saat normal sangat melimpah di Kota Bekasi. Dengan posisi geografis yang sangat strategis pangan-pangan terutama pangan pokok dapat masuk dengan mudah di Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,4 juta orang Kota Bekasi adalah pasar yang menarik bagi produsen hasil pertanian dan perkebunan. Banyaknya jenis pangan yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan kalori dan gizi masyarakat. Konsumsi pangan belum memperhatikan penganekaragaman pangan sehingga pemenuhan kebutuhan kalori terfokus hanya pada beras. Adapun faktor penyebab belum berkembangannya pemanfaatan keberagaman pangan yang ada

adalah sebagai berikut: (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

- 1) Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang keanekaragaman pangan
- 2) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
- 3) Rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang aman dan bebas bahan kimia.
- 4) Pengolahan pangan alternative agar layak konsumsi belum maksimal
- 5) Serta belum beragamnya pola konsumsi pangan B2SA sebagaimana anjuran.
- 6) Terbatasnya alat uji kualitas pangan
- 7) Kurangnya tenaga penguji makanan yang kompeten

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan kondisi terkini pembangunan ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan permasalahan yang mungkin muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan maka diidentifikasi isu-isu strategis yang kemungkinan dan menghambat atau membantu mempercepat keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, pertanian, perikanan, atas dasar isu tersebut telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih adanya daerah rawan pangan	<p>1. Kurangnya SDM Sesuai Kebutuhan bidang ilmu pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan perikanan Kota Bekasi</p> <p>2. Masih adanya KK yang belum mampu menjangkau harga terhadap kebutuhan pangan;</p> <p>3. Pangan segar asal tumbuhan terindikasi masih ada yang menggunakan bahan pangan tambahan</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia bidang ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan belum memadai;</p> <p>2. Sumber daya manusia bidang kedokteran hewan belum memadai;</p> <p>3. Sumber Daya Manusia Penguji Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) belum memadai</p> <p>1. Kenaikan harga komoditas pangan strategis (stabilitas harga pangan strategis);</p> <p>2. Keterbatasan lahan;</p> <p>3. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah.</p> <p>1. Keterbatasan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang ada di pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Bekasi</p> <p>2. Keterbatasan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang ada di pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Bekasi</p> <p>3. Belum tersedianya ruang pemeriksaan pengujian sampel pangan asal tumbuhan (PSAT)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		<p>4. Produksi pertanian tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Bekasi</p> <p>5. Produksi peternakan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Bekasi;</p>	<p>1. Keterbatasan Lahan Pertanian</p> <p>2. Kurangnya minat generasi muda untuk melakukan usaha pertanian</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>4. Budidaya pertanian dilakukan secara konvensional karena penggunaan teknologinya belum optimal.</p> <p>1. Keterbatasan Lahan peternakan;</p> <p>2. Unit pelayanan kesehatan hewan yang belum memenuhi kriteria teknis;</p> <p>3. Kota Bekasi endemis penyakit flu burung.</p> <p>4. Beredarnya produk hewan yang belum memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);</p> <p>5. Rumah Potong Hewan belum memenuhi kriteria teknis;</p> <p>6. Belum tersedianya rumah potong hewan unggas;</p> <p>7. Unit usaha produksi dan distribusi produk hewan yang belum menerapkan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>8. Predaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan indonesia /ilegal;</p> <p>9. Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		6. Produksi Perikanan belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi	1. Keterbatasan lahan perikanan; 2. Biaya produksi budidaya ikan tinggi; 3. Minimnya sarana dan prasarana di tingkat pelaku usaha perikanan; 4. Kurangnya promosi pemasaran bagi pelaku usaha perikanan; 5. Keterbatasan modal.

Dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kompetensi Pegawai bidang teknis dan penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta penguji sampel pangan asal tumbuhan (PSAT);
2. Pemenuhan ketersediaan pangan strategis;
3. Pengembangan program diversifikasi pangan melalui program pangan lestari (P2L);
4. Pemenuhan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah;
5. Masih adanya pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP)
6. Alih fungsi lahan pertanian;
7. Budidaya pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat;
8. Kebutuhan akan ternak dan produk ternak sangat tinggi baik untuk konsumsi maupun keperluan keagamaan (aqiqah dan qurban);
9. Budidaya ternak dan peningkatan nilai tambah produk peternakan sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat;
10. Tujuh puluh lima persen (75%) penyakit baru pada manusia bersumber dari hewan (zoonosis);
11. Antimikrobia resistan dan antimikrobia misus (resistensi antibiotika pada

manusia akibat penggunaan antibiotika yang tidak terkendali pada hewan ternak dan penyalahgunaan antibiotika pada manusia untuk hewan atau obat hewan untuk manusia);

12. Jaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk pangan asal hewan;
13. Peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
14. Usaha perikanan sebagai pendukung ekonomi masyarakat dan sumber pangan;
15. Keterbatasan tenaga teknis bidang perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kota Bekasi, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan adalah ketersediaan pangan serta kemampuan seseorang/masyarakat untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran terhadap gangguan pada masa depan atau kekurangan suplai pangan akibat berbagai faktor seperti kekeringan, bencana alam, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan pembangunan ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan peternakan periode 2024–2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran DKPPP yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- Tujuan Renstra** : 1. Mewujudkan Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah;
2. Mengendalikan Laju Inflasi;
3. Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota.
- Indikator** : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Laju Inflasi;
3. Peningkatan Pengeluaran Perkapita.
- Sasaran Renstra** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP;
2. Menjaga Stabilitas harga komoditas;
3. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan.

- Indikator** : 1. Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
2. Inflasi Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau;
3. Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			KET
					2024	2025	2026	
					TARGET	TARGET	TARGET	
1	Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan Layanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88	90	96	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai AKIP DKPPP	80	82	86	88	
2	Mengendalikan Laju Inflasi		Laju Inflasi	1,61	3,05 ± 1	3,08 ± 1	3,07 ± 1	
		Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	0,54%	0,48%	0,45%	0,40%	
3	Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota		Peningkatan Pengeluaran Perkapita	0,81%	1,50%	1,50%	1,50%	
		Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	1,11%	1,14%	1,15%	1,16%	

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Formulasi Perhitungan IKU DKPPP Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil Nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan
2.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	Persen	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Nilai Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2024	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Persen	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Nilai Pengeluaran Konsumsi Perkapita Susenas (Untuk PK-RT Tahunan)	Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2024	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan- pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak- belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan DKPPP Kota Bekasi yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun hasil

analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan DKPPP Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/ Strength (S)

- a. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur DKPPP setiap tahunnya;
- c. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan.
- d. Terdapatnya pelaksanaan program urban farming;

2. Kelemahan/ Weakness (W)

- a. Produksi pangan Kota Bekasi hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan penduduk Kota Bekasi;
- b. Jumlah Sumber Daya Aparatur teknis masih terbatas dalam menunjang kinerja DKPPP;
- c. Belum memadainya jumlah cadangan pangan daerah;
- d. Belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan/ lumbung pangan;
- e. Masih rendahnya diversifikasi pangan daerah;
- f. Terbatasnya lahan pertanian, peternakan dan perikanan.

3. Peluang/ Opportunity (O)

- a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap DKPPP dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah;
- b. Adanya stabilitas harga pangan daerah yang terkendali;
- c. Peraturan Perundangan yang kondusif;
- d. Adanya ketersediaan pangan lokal di pasar sebagai keanekaragaman pangan;
- e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- f. Menjalani kerjasama dengan berbagai daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan;

4. Ancaman/ Threat (T)

- a. Lahan pertanian , peternakan dan perikanan makin berkurang sehingga menurunnya hasil pertanian, peternakan dan perikanan;

- b. Bertambahnya konsumsi bahan makanan dengan meningkatnya jumlah yang dikonsumsi;
- c. Adanya pola pangan harapan (PPH) konsumsi makanan pokok masyarakat yang masih tinggi;
- d. Adanya Fluktuasi harga pangan;
- e. Adanya bencana alam;
- f. Adanya ancaman penyakit zoonosis;
- g. Terjadinya peningkatan inflasi.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Penilaian Analisa SWOT DKPPP Kota Bekasi

Analisa Lingkungan Internal (Strength & Weakness)

Kekuatan (Strength)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	3
	2.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur DKPPP setiap tahunnya;	2
	3.	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan;	3
	4.	Terdapatnya Pelaksanaan program urban farming;	3
	TOTAL		

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Produksi pangan Kota Bekasi hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan penduduk Kota Bekasi;	3
	2.	Jumlah Sumber Daya Aparatur teknis masih terbatas dalam menunjang kinerja DKPPP	3
	3.	Belum memadainya jumlah cadangan pangan daerah;	2
	4.	Belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan/ lumbung pangan;	2
	5.	Masih rendahnya diversifikasi pangan daerah;	3
	6.	Terbatasnya lahan pertanian, peternakan dan perikanan.	3
	TOTAL		

Analisa Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats)

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap DKPPP dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah;	3
	2.	Adanya stabilitas harga pangan daerah yang terkendali;	2
	3.	Peraturan Perundangan yang kondusif;	3
	4.	Adanya ketersediaan pangan lokal di pasar sebagai keanekaragaman pangan;	3
	5.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	2
	6.	Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan;	3
		TOTAL	16

Tantangan (Threat)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Lahan pertanian , peternakan dan perikanan makin berkurang sehingga menurunnya hasil pertanian, peternakan dan perikanan;	3
	2.	Bertambahnya konsumsi bahan makanan dengan meningkatnya jumlah yang dikonsumsi;	3
	3.	Adanya pola pangan harapan (PPH) konsumsi makanan pokok masyarakat yang masih tinggi;	3
	4.	Adanya Fluktuasi harga pangan;	2
	5.	Adanya bencana alam;	2
	6.	Adanya ancaman penyakit zoonosis;	3
	7.	Terjadinya peningkatan inflasi.	2
	TOTAL	18	

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisa SWOT di atas, maka peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.

KELEMAHAN (WEAKNESS)	S-T	W-T
1. Belum terpenuhinya Produksi pangan Kota Bekasi, hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan penduduk Kota Bekasi; 2. Masih terbatasnya Jumlah aparatur teknis; 3. Belum meratanya kompetensi aparatur perencana pada DKPPP; 4. Belum memadainya jumlah cadangan pangan daerah; 5. Rendahnya diversifikasi pangan; 6. Masih terbatasnya lahan pertanian, peternakan dan perikanan.	1. Meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan dan perikan; 2. Meningkatkan jumlah aparatur teknis; 3. Meningkatkan Pola Panga Harapan (PPH) Konsumsi.	1. Mendorong peningkatan lahan pertanian, peternakan dan perikanan; 2. Melakukan koordinasi dalam menanggulangi penyakit hewan menular zoonosis ; 3. Mengendalikan laju inlasi; 4. Memperkuat setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan penerapan SOP.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan pembangunan daerah. Strategi dirumuskan berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

Strategi dalam Renstra DKPPP adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan DKPPP Kota Bekasi yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD. Strategi pembangunan DKPPP menunjukkan bagaimana cara DKPPP mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi DKPPP.

Strategi dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DKPPP bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DKPPP.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DKPPP mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka strategi DKPPP Kota Bekasi antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemenuhan ketersediaan pangan strategis;
- b. Peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD);
- c. Peningkatan Kompetensi pegawai bidang teknis dan penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta penguji sampel pangan asal tumbuhan (PSAT);
- d. Peningkatan pengembangan program diversifikasi pangan melalui program pangan lestari (P2L);
- e. Meningkatkan budidaya pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat;
- f. Peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); dan
- g. Peningkatan usaha perikanan sebagai pendukung ekonomi masyarakat dan sumber pangan.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah tindakan keputusan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Daerah yaitu sebagai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan didasarkan dalam ketentuan – ketentuan yang akan di pergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman maupun petunjuk dalam pengembangan program atau kegiatan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah untuk mewujudkan sasaran menjaga stabilitas harga komoditas serta meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan

Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang, berikut disajikan dalam bentuk table dibawah ini :

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

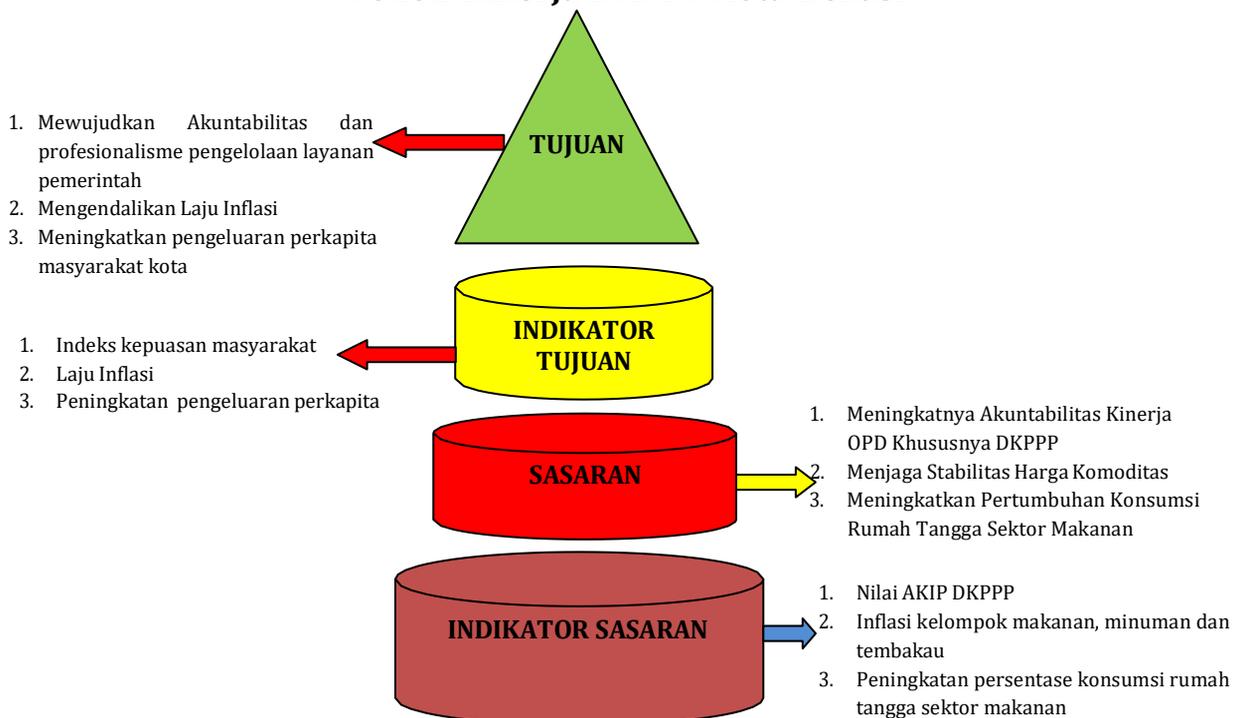
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD khususnya DKPPP	Meningkatkan Kualitas dan Pengawasan Kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi	Melaksanakan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi
Mengendalikan laju inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan Bantuan Cadangan Pangan - Gelar Pasar Murah - Memberikan Bantuan Bibit cabe Kepada Kelompok Tani (Poktan) dan Bantuan Benih Ikan Konsumsi kepada Kelompok Budidaya. 	Melaksanakan Operasi Pasar
Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Menjamin Kualitas/Mutu Pangan Lokal yang Layak di Konsumsi Masyarakat Melalui Pengujian PSAT

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

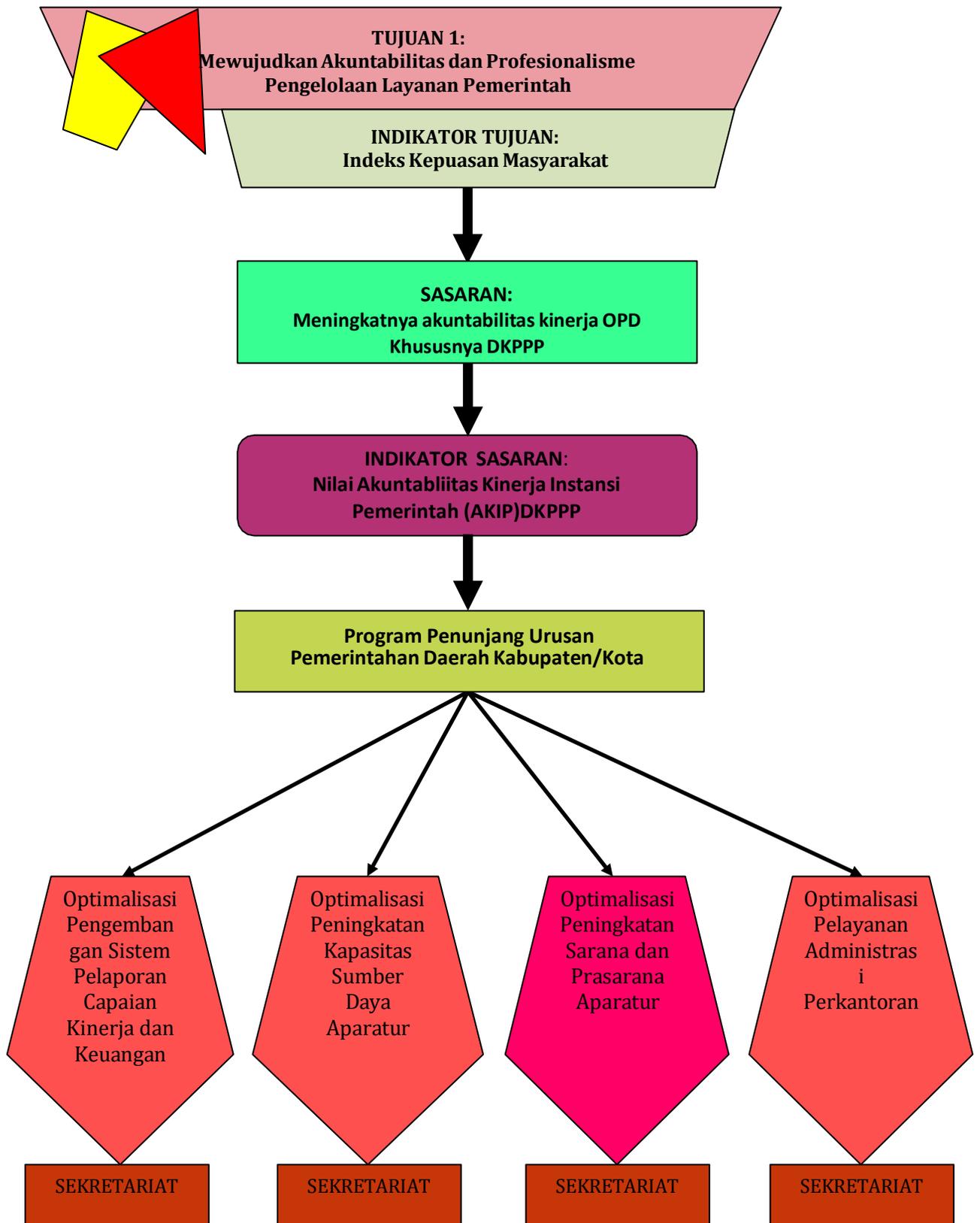
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

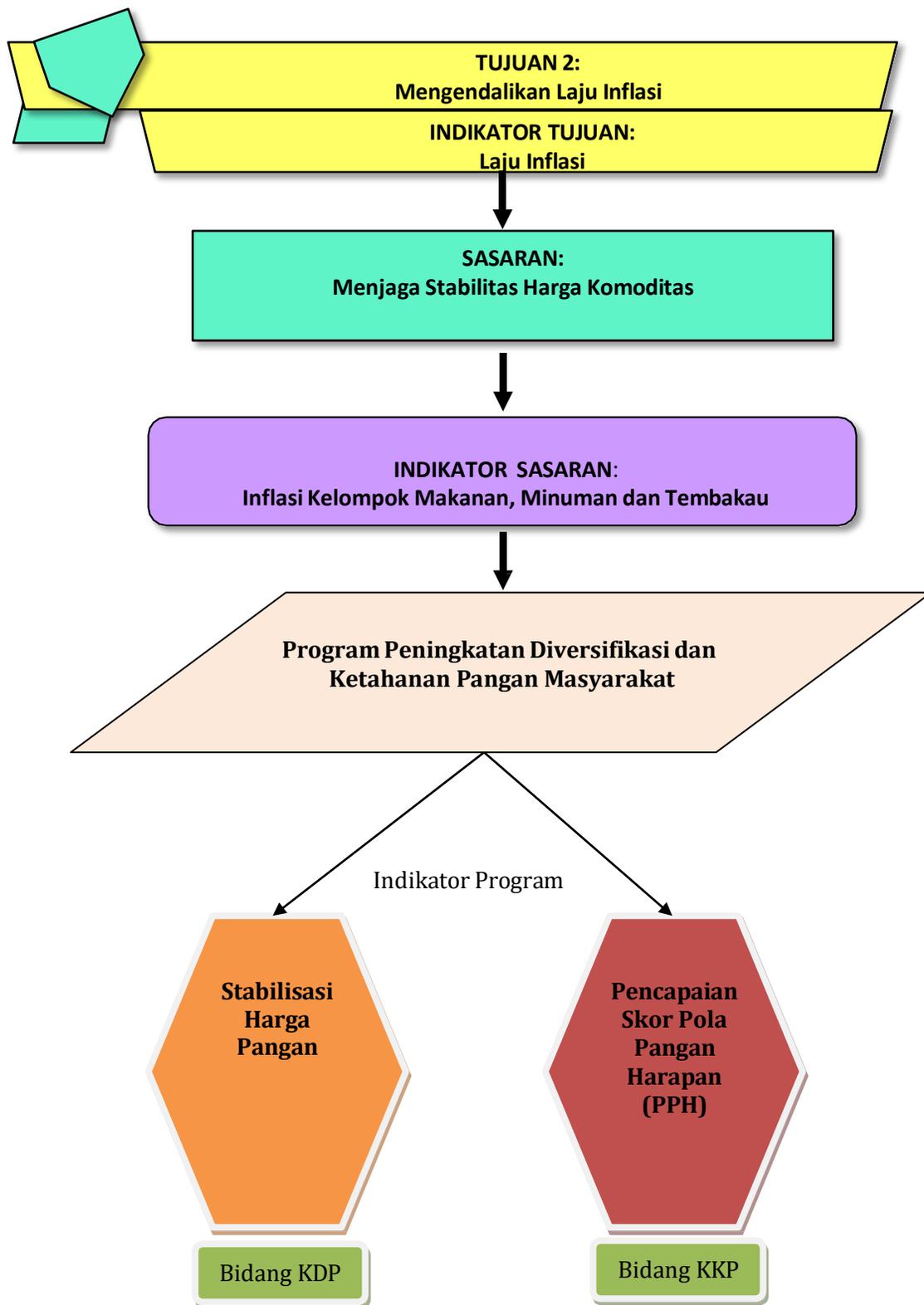
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel” dan “Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota . Adapun Sasaran dari Tujuan Pembangunan tersebut yaitu “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, dan Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”. Berikut digambarkan alur pohon kinerja Pembangunan Kota Bekasi yang terkait Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sampai pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DKPPP.

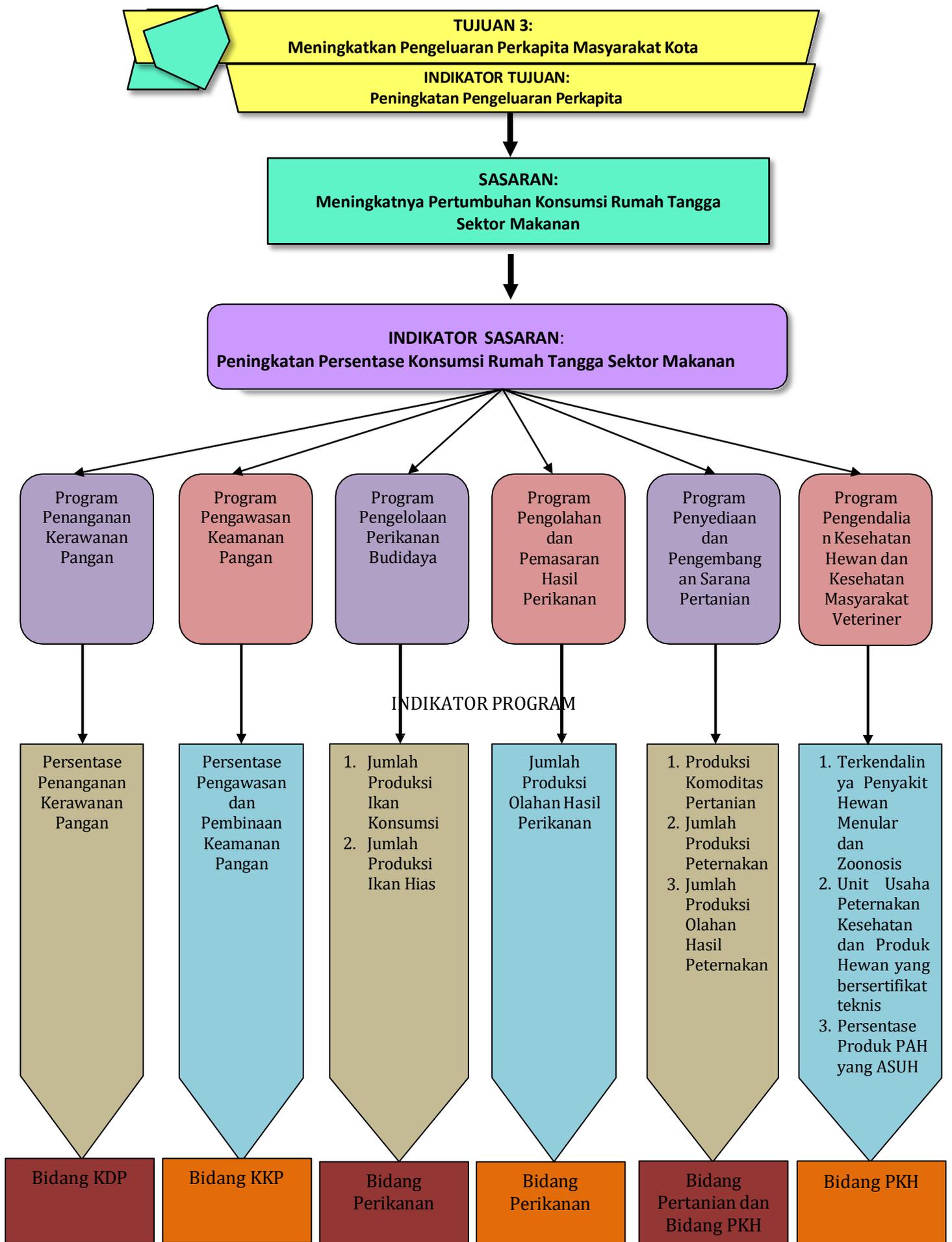
Gambar 6.1.
Pohon Kinerja DKPPP Kota Bekasi



**RENSTRA DKPPP Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**







Program dan kegiatan DKPPP setiap tahunnya dari 2024 sampai dengan 2026 secara rinci ditunjukkan dalam tabel 6.1. Untuk Program dan Kegiatan ditambah Sub Kegiatan untuk Tahun 2024, 2025, dan 2026 berdasarkan Renstra DKPPP Tahun 2024-2026 Tabel 6.1 (nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Berikut rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 secara rinci, Program yang akan direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Akan tetapi keberhasilan pelaksanaan program prioritas diperlukan program yang mendukung kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN (DKPPP) TAHUN 2024-2026
(nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah				Indeks Kepuasan masyarakat	85	88		90		95		95		Kota Bekasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD khususnya DKPPP			Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	80	82		85		88		88		Kota Bekasi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15,132,918,000	100%	16,132,918,000	100%	17,132,918,000	100%	17,132,918,000	Kota Bekasi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	Kota Bekasi
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	11 laporan	20,000,000	11 laporan	20,000,000	11 laporan	20,000,000	11 laporan	20,000,000	Kota Bekasi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15,092,918,000	100%	16,092,918,000	100%	17,092,918,000	100%	17,092,918,000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1836 orang	1484 orang	15,072,918,000	1484 orang	16,072,918,000	1484 orang	17,072,918,000	1484 orang	17,072,918,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	4 laporan	20,000,000	4 laporan	20,000,000	4 laporan	20,000,000	4 laporan	20,000,000	
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	12 orang	80,000,000	12 orang	90,000,000	12 orang	90,000,000	12 orang	90,000,000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75 orang	75 orang	200,000,000	75 orang	200,000,000	75 orang	200,000,000	75 orang	200,000,000	
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,220,000,000		2,212,000,000		2,330,000,000		2,330,000,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	730,000,000	100%	745,000,000	100%	760,000,000	100%	760,000,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	60,000,000	1 paket	65,000,000	1 paket	70,000,000	1 paket	70,000,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	380,000,000	6 paket	390,000,000	6 paket	400,000,000	6 paket	400,000,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	40,000,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	70 laporan	120,000,000	70 laporan	120,000,000	70 laporan	120,000,000	70 laporan	120,000,000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	100,000,000	100 Dokumen	100,000,000	100 Dokumen	100,000,000	100 Dokumen	100,000,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	10 unit	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100%	1.140.000.000	100%	1.117.000.000	100%	1.220.000.000	100%	1.220.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	17 unit	210.000.000	17 unit	230.000.000	17 unit	250.000.000	17 unit	250.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	16 unit	360.000.000	16 unit	380.000.000	16 unit	400.000.000	16 unit	400.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	75 unit	70.000.000	75 unit	7.000.000	75 unit	70.000.000	75 unit	70.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000	
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.227.580.025	100%	3.727.580.025	100%	4.227.580.025	100%	4.227.580.025	Kota Bekasi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	3.227.580.025	100%	3.727.580.025	100%	4.227.580.025	100%	4.227.580.025	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	60 laporan	200.000.000	60 laporan	200.000.000	60 laporan	200.000.000	60 laporan	200.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.027.580.025	12 Laporan	3.527.580.025	12 Laporan	4.027.580.025	12 Laporan	4.027.580.025	
Mengendalikan Laju Inflasi				1. Laju Inflasi	1,61%	3,05 ± 1		3,08 ± 1		3,07 ± 1		3,07 + 1		
	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas			Inflasi bahan makanan	0,54%	0,48%		0,45%		0,40%		0,40%		
		2	9	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		325.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000	
				Stabilisasi Harga Pangan	<5%	<5%	175.000.000	<5%	200.000.000	<5%	250.000.000	<5%	250.000.000	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI				
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					
		2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000		
		2	9	3	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0	1 unit	175,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	Kota Bekasi
							Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	87.94%	88.50%	150,000,000	89.00%	200,000,000	90.00%	250,000,000	90.00%	250,000,000		
		2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	
		2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	Kota Bekasi
Meningkatnya Pengeluaran perkapita Masyarakat Kota							2. Peningkatan Pengeluaran Perkapita		0.81%	1.50%		1.50%		1.50%		1.50%		
	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan (lihat PDRB pengeluaran)						Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan		1.11	1.14		1.15		1.16		1.16		
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	80.58%	87%	4,000,000,000	87.50%	4,000,000,000	88.00%	4,000,000,000	88.00%	4,000,000,000	Kota Bekasi
		2	9	4	2.01		Penyusunan peta kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	100%	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Kota Bekasi
		2	9	4	2.01	1	Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Muktahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	Kota Bekasi
		2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	100%	100%	3,850,000,000	100%	3,800,000,000	100%	3,750,000,000	100%	3,750,000,000	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN						LOKASI			
										2024		2025	2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		TARGET	PAGU (Rp)	
		2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	84%	88,50%	300.000.000	89,00%	350.000.000	90,00%	400.000.000	90,00%	400.000.000	Kota Bekasi	
		2	9	5	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
		2	9	5	2	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Kota Bekasi	
		3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				600.000.000			900.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
								Jumlah produksi ikan konsumsi	1.910 ton	1.974,79 ton	200.000.000	1.994,54 ton	300.000.000	2.014,49 ton	400.000.000	2.014,49 ton	400.000.000	400.000.000	Kota Bekasi
		3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	100%	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	400.000.000	
		3	25	4	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti pengembangan kapasitas	5 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000	15 Kelompok	300.000.000	20 Kelompok	400.000.000	20 Kelompok	400.000.000	400.000.000	Kota Bekasi
								Jumlah Produksi Ikan Hias	22.737.661 Ekor	25.361.323	400.000.000	25.614.936	600.000.000	25.871.086	1.000.000.000	25.871.086	1.000.000.000	1.000.000.000	
		3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pembudidaya Ikan yang dikelola	100%	100%	400.000.000	100%	600.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	
		3	25	4	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit	400.000.000	15 Unit	600.000.000	20 Unit	1.000.000.000	20 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	Kota Bekasi
		3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahhan Hasil Perikanan	89.130,50 ton	93.865,05 ton	700.000.000	95.000 ton	900.000.000	97.000 ton	1.100.000.000	97.000 ton	1.100.000.000	1.100.000.000	Kota Bekasi
		3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina	100%	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	400.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI				
						2024		2025	2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA							
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					
		3	25	6	2.02	01	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	10 Unit usaha	200.000.000	15 Unit Usaha	300.000.000	20 Unit Usaha	400.000.000	20 Unit Usaha	400.000.000	Kota Bekasi
		3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota		100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	
							Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	93.000 ton	500.000.000	95.000 ton	600.000.000	97.000 ton	700.000.000	97.000 ton	700.000.000	Kota Bekasi
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.975.000.000		2.200.000.000		2.425.000.000		2.425.000.000	
								Produksi komoditas pertanian	34.250 ton	36.168 ton	450.000.000	36.711 ton	475.000.000	37.261 ton	500.000.000	37.261 ton	500.000.000	Kota Bekasi
		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian Yang Terawasi	100%	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	
		3	27	03	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	475.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	Kota Bekasi
								Jumlah produksi peternakan	10.765 ton	11.093 ton	1.150.000.000	11.195 ton	1.175.000.000	11.300 ton	1.200.000.000	11.300 ton	1.200.000.000	
		3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kab/ Kota yang dikelola	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	
		3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	Kota Bekasi
		3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40%	45%	150.000.000	50%	175.000.000	55%	200.000.000	40%	200.000.000	
		3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI		
						2024		2025	2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
				Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	3.700 ton	3.817 ton	375.000.000	3.875 ton	550.000.000	3.925 ton	725.000.000	3.925 ton	725.000.000			
		3	27	02	2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang diawasi	100%	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000		
		3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	125.000.000	Kota Bekasi
		3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang tersedia	100%	100%	300.000.000	100%	450.000.000	100%	600.000.000		
		3	27	02	2.06	01	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	10 Ekor	300.000.000	12 Ekor	450.000.000	15 Ekor	600.000.000	Kota Bekasi
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
							Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	tidak ada	tidak ada	324.500.000	tidak ada	350.000.000	tidak ada	395.000.000		
		3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	324.500.000	100%	350.000.000	100%	395.000.000		
		3	27	04	2.01	01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	1 laporan	324.500.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	395.000.000	Kota Bekasi
							Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	65 unit	80 unit	300.000.000	85 unit	400.000.000	90 unit	475.000.000		
		3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	475.000.000		
		3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0	1 laporan	100.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	200.000.000	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan)	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan KEPMENDAGRI NO. 050.5889 TAHUN 2021)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAFTARAN								LOKASI				
						2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					
		3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	1 laporan	200,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	275,000,000	Kota Bekasi
							Persentase produk PAH yang ASUH	44%	45.20%	325,000,000	45.40%	400,000,000	45.50%	475,000,000	45.50%	475,000,000		
		3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1 laporan	225,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	275,000,000	Kota Bekasi
		3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang diterapkan dan diawasi	100%	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
		3	27	04	2.05	01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	0	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	Kota Bekasi
TOTAL										29,709,998,025		32,262,498,025		35,150,498,025		35,150,498,025		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA DKPPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA BEKASI TAHUN 2024 - 2026

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan pertanian, perikanan dan peternakan di Kota Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Tahun 2024 -2026, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DKPPP;
2. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau;
3. Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan. Mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut, Indikator Kinerja pada bidang selaras dengan Program Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu :
 1. Stabilitas harga pangan
 2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 3. Persentase Penangan Kerawanan Pangan;
 4. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
 5. Jumlah produksi ikan konsumsi;
 6. Jumlah produksi ikan hias;
 7. Jumlah produksi olahan hasil perikanan;
 8. Total Produksi Komoditas pertanian;
 9. Jumlah produksi peternakan;

10. Jumlah produksi olahan hasil peternakan;
11. Terkendalinya penyakit menular dan zoonosis;
12. Unit usaha peternakan kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis;
13. Persentase produk PAH yang ASUH.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dijelaskan pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP)
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi awal	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Akhir	
								2024		2025		2026			
								target	Rp milyar	target	Rp milyar	target	Rp milyar	target	Rp milyar
1.	Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat					86	88		90		96		96	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan			80	82		86		88		88	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%	

2.	Mengendalikan Laju Inflasi	Laju Inflasi						3,05 ±1		3,08 ±1		3,07 ±1		3,07 ±1	
			Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau			0,54%	0,48%		0,45%		0,40%		0,40%	
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga pangan	<5,00%	<5,00%		<5,00%		<5,00%		<5,00%	
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,94%	88,50%		89,00%		90,00%		90,00%	
3.	Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota	Peningkatan Pengeluaran Perkapita					0,81%	1,50%		1,50%		1,50%		1,50%	
			Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan			1,11%	1,14%		1,15%		1,16%		1,16%	
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	80,58%	87,00 %		87,50		88,00		88,00	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	84%	88,50%		89%		90,00%		90,00%	
					Program Pengelolaan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	1.910 ton	1.974,79 ton		1.994,54 ton		2.014,49 ton		2.014,49 ton	

					Budidaya	Jumlah Produksi Ikan Hias	22.737.661 ekor	25.361.323 ekor		25.614.936 ekor		25.871.086 ekor		25.871.086 ekor	
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	89.130,50 ton	93.865,05 ton		95.000 ton		97.000 ton		97.000 ton	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	34.250,00 ton	36.168 ton		36.711 ton		37.261 ton		37.261 ton	
				Jumlah Produksi Peternakan		10.765,00 ton	11.093 ton		11.195 ton		11.300 ton		11.300 ton		
				Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan		3.700 ton	3.817 ton		3.875 ton		3.925 ton		3.925 ton		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		
					Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk Hewan Yang Bersertifikat Teknis	65 unit	80 unit		85 unit		90 unit		90 unit		
					Persentase Produk PAH yang ASUH	44%	45,20 %		45,40 %		45,50%		45,50%		

Tabel 7.2

DATA INDIKATOR PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Perangkat Daerah	Kondisi Awal 2022	Target Indikator IKK Outcome		
						2024	2025	2026
1	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,86%	1.02%	1.01%	1.01%

2	<p>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)</p> <p>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</p> <p>3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan</p>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %
3	<p>1. Sarana pertanian yang diberikan</p> <p>2. Prasarana pertanian yang digunakan</p> <p>3. Penerbitan izin usaha pertanian</p> <p>4. Persentase prasarana yang digunakan</p> <p>5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota</p>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	<p>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun</p> <p>----- x 100%</p> <p>Luas panen</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7,71%	7,91%	8,00%	8,00%
4	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	<p>Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	<p>Realisasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>RDKK</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	49,50%	80 %	80 %	80 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024- 2026 Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Renstra ini disusun secara sistematis dan teknokratis dengan memperhatikan kebijakan - kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai uraian Bab Penutup Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2024 - 2026 ini dijelaskan dasar pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan ditetapkannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan DKPPP Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026.
2. Dengan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 diharapkan menjadi acuan baik secara operasional dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 dijadikan media pengukuran evaluasi kinerja secara keseluruhan dari tahun 2024 - 2026 sekaligus sebagai laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sampai tahun 2026.
4. Disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dijadikan tonggak terwujudnya keselarasan dari seluruh lapisan Perangkat Daerah dalam perencanaan kinerja tahunan dan diharapkan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang tersusun dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi.
5. Dengan adanya Renstra Dinas Ketahanan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2024 - 2026 ini diharapkan target kinerja dapat tercapai.

Bekasi, Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



HERBERT S.W PANIAITAN, S.STP., M.SI

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19741017 199603 1 002